

BAB III

MOTIVASI TIONGKOK DALAM MEMEDIASI SUDAN SELATAN

Setelah memahami karakteristik dari *quasi-mediation* serta mendalami pola mediasi Tiongkok di Sudan Selatan, pada bab ini penulis akan mengelaborasi mengenai alasan Tiongkok untuk bersedia memediasi konflik di Sudan Selatan. Pada bagian ini penulis akan meng-analisis data yang telah ditinjau pada bab sebelumnya untuk dijadikan landasan dalam menjawab pertanyaan penelitian dari tulisan ini. Melanjutkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis juga menggunakan pendekatan yang ditulis oleh Degang Sun dan Yahia Zoubir. Sun dan Zoubir menjelaskan bahwa partisipasi Tiongkok dalam proses penyelesaian konflik lebih didorong oleh kebutuhan ekonomi ketimbang ideologi. Disisi lain, Sun dan Zoubir juga mengidentifikasi bahwa terdapat empat faktor yang memotivasi keterlibatan Tiongkok dalam penyelesaian konflik, beberapa faktornya ialah geoekonomi dari kawasan tersebut, jangkauan pengaruh Tiongkok, keterlibatan aktor dominan dan tingkat kesulitan dari penyelesaian konflik (Sun & Zoubir, 2017, pp. 8-14).

Pada bagian ini penulis melihat bahwa faktor-faktor yang disebutkan oleh Sun dan Zoubir ini bukanlah faktor yang terpisah, melainkan merupakan suatu faktor yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Pada kasus yang terjadi di Sudan Selatan, faktor ekonomi memang menjadi penggerak utama dari keikutsertaan Tiongkok dalam penyelesaian konflik, namun beberapa faktor lain juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam memberikan dorongan bagi Tiongkok untuk berkontribusi dalam proses mediasi di Sudan Selatan.

Pada bab ini penulis akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan Tiongkok untuk memediasi konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Bagian ini juga akan mengelaborasi perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok menjadi lebih aktif dalam isu-isu penyelesaian konflik internal negara lain, hal ini bertolak belakang dengan prinsip yang dianut oleh pemerintah Tiongkok yakni prinsip non-intervensi.

3.1 Relevan Dengan Kepentingan Geo-ekonomi Tiongkok

Pada bagian ini penulis akan mengelaborasi mengenai kepentingan geo-ekonomi Tiongkok yang menjadi dasar dari keterlibatannya pada proses mediasi di Sudan Selatan. Sesuai dengan bagian sebelumnya, upaya mediasi Tiongkok didorong oleh kepentingan komersial di kawasan Sudan Selatan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa semakin besar kepentingan ekonomi Tiongkok, maka semakin besar pula potensi Tiongkok untuk bersedia memediasi konflik tersebut. Pada artikel ini juga disebutkan bahwa pihak ketiga hanya mau melakukan mediasi apabila proses mediasi tersebut akan memberikan keuntungan ekonomi bagi pihak ketiga. Disisi lain, Sun dan Zoubir melihat bahwa terdapat tiga hal yang memotivasi keinginan Tiongkok untuk berperan di kawasan MENA, diantaranya ialah: Ingin mengamankan jalur perdagangan minyak serta menjaga stabilitas harga kebutuhan energi, menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan MENA guna mencegah aktor lain memonopoli kawasan tersebut, yang terakhir ialah upaya untuk menjaga stabilitas kawasan agar tidak mengganggu iklim investasinya (Sun & Zoubir, 2017, pp. 8-10).

3.1.1 Pengaruh Industri Minyak Tiongkok

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, industri perminyakan merupakan arena utama dari kepentingan ekonomi Tiongkok di Sudan Selatan, namun yang perlu disoroti ialah bagaimana Tiongkok mampu mengembangkan industri perminyakannya dengan menjadikan Sudan Selatan sebagai arena percobaannya. Hal inilah yang kemudian menjadikan Sudan Selatan sebagai simbol dari perkembangan industri perminyakan Tiongkok, dimana proses internasionalisasi CNPC terjadi pada kawasan Sudan dan Sudan Selatan yang pada akhirnya memberikan kesempatan bagi CNPC untuk memperluas investasinya di berbagai negara. Faktor geo-ekonomi inilah yang membuat Tiongkok memberikan perhatian bagi Sudan Selatan, meskipun Sudan Selatan hanya berkontribusi terhadap 5% kebutuhan minyak Tiongkok. Ledakan ekonomi yang menerpa Tiongkok sejak satu dekade lalu telah membuat Tiongkok membutuhkan pasokan energi dalam jumlah yang besar, sementara produksi minyak Tiongkok belum mampu menutupi kebutuhan industri tersebut. Hal ini yang membuat Beijing melakukan impor guna menutupi kebutuhan domestiknya (Xu, 2017, p. 2).

Meskipun jumlahnya tidak signifikan jika dibanding keseluruhan kebutuhan energi Tiongkok, pada faktanya Sudan Selatan merupakan negara dengan jumlah pasokan minyak terbesar ke-2 dibawah Angola. Hal ini yang membuat Tiongkok berupaya untuk melindungi aset mereka dengan melakukan beberapa lobi politik serta menekan pihak yang bertikai untuk menjaga keamanan aset properti Tiongkok. Dalam hal ini penulis melihat bahwa Tiongkok menjadikan keamanan aset industri perminyakannya menjadi prioritas utama dalam upayanya menyelesaikan konflik di Sudan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari reaksi para

politisi Tiongkok ketika mengetahui Sudan Selatan mengalami perang sipil pada tahun 2013. Reaksi pertama dari Zhong Jianhua ialah meminta Sudan Selatan untuk menjaga aset properti Tiongkok pada kawasan tersebut (FMPRC, 2013).

Hal ini juga dapat dilihat dari upaya Tiongkok yang secara aktif mengirimkan tentaranya ke Sudan Selatan. Pada tahun 2014 tercatat Tiongkok mengirimkan 700 tentaranya ke *United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)* (Ng, 2014; Reuters, 2014). Situasi ini cukup memberikan perhatian oleh karena sikap Tiongkok yang mulai aktif dalam pengerahan tenaga perdamaian melalui *UN Peacekeeping*, dimana sebelumnya Tiongkok dikenal memiliki pandangan skeptis terhadap badan UN ini. Disisi lain, pada Deklarasi Khartoum Tiongkok juga telah menjalin kesepakatan dengan Sudan Selatan mengenai kerjasama pengamanan kilang-kilang minyak dari serangan pemberontak akibat dari adanya perang sipil berkepanjangan di Sudan Selatan (Xinhua, 2019). Hal ini menandakan bahwa penerjunan personel militer Tiongkok untuk misi di Sudan Selatan, serta perjanjian kerjasama pengamanan kilang minyak merupakan upaya dari Tiongkok untuk menjaga industri perminyakannya tetap aman dari perusakan yang disebabkan oleh perang sipil.

Dalam hal lain, penulis juga melihat adanya upaya Tiongkok untuk menjadikan Sudan Selatan sebagai investasi jangka panjang bagi penyediaan kebutuhan energi Tiongkok. Hal ini dilihat dari bagaimana Tiongkok memandang Sudan Selatan sebagai negara yang memiliki prospek jangka panjang dalam bidang energi, khususnya sebelum konflik terjadi pada 2013. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Menteri Perminyakan Sudan Selatan yang mengatakan bahwa Sudan Selatan merupakan negara yang mengapung diatas minyak. Ia menambahkan

bahwa baru sekitar 12% lahan Sudan Selatan yang telah di eksplorasi oleh industri minyak, sedangkan masih terdapat 80% lahan belum di eksplorasi (Al Jazeera, 2019). Sementara Sudan Selatan tidak memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi lahan tersebut akibat dari kurangnya teknologi. Sehingga hal tersebut mengkonfirmasi kehadiran Tiongkok untuk memediasi konflik Sudan Selatan adalah dalam rangka untuk menjaga sektor perminyakan tersebut agar tidak dikuasai oleh pihak lain.

Absennya kekuatan Eropa dan Amerika Serikat dalam eksplorasi Sudan Selatan merupakan keuntungan bagi Tiongkok dalam melakukan monopoli kawasan. Fakta-fakta tersebut yang meyakini penulis bahwa keterlibatan Tiongkok dalam proses mediasi konflik Sudan Selatan dilatarbelakangi oleh adanya upaya strategis dari Tiongkok untuk memonopoli sektor perminyakan Sudan Selatan yang belum di huni oleh kekuatan besar lain. Hal ini disebabkan oleh ketidakpedulian Tiongkok terhadap isu-isu HAM dan demokrasi yang membuat Tiongkok menjadi aktor utama dalam mengeksplorasi kawasan Sudan Selatan. Penulis menilai bahwa meskipun Tiongkok berperan dalam proses kampanye penghentian kekerasan di Sudan Selatan, namun jika ditinjau melalui pendekatan ekonomi, Tiongkok sebetulnya tidak memperdulikan hal-hal tersebut.

Penulis melihat bahwa Tiongkok berupaya untuk melakukan monopoli ekonomi di Sudan Selatan secara menyeluruh, meskipun pusat dari monopoli tersebut bersumber dari industri perminyakan. Hal ini dapat dilihat melalui fakta bahwa Sudan Selatan menjadikan Tiongkok sebagai destinasi ekspor minyak utamanya. Hal ini mengindikasikan bahwa Tiongkok berkontribusi secara maksimal terhadap pemasukan negara Sudan Selatan yang 98% pendapatan

negaranya didapatkan dari sektor perminyakan (Mbah, 2018). Pendapatan industri perminyakan ini yang kemudian digunakan oleh pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan pembangunan infrastruktur negaranya yang mereka namakan sebagai *oil for development policy*. Namun jika dilihat lebih dalam, proses pembangunan infrastruktur ini tidak luput dari peran Tiongkok. Proses pembangunan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Sudan Selatan dengan Tiongkok dimana *Shandong Hi-Speed Co.* dipilih sebagai perusahaan konstruksi yang akan membangun infrastruktur tersebut.

Sehingga dapat dilihat bahwa kehadiran Tiongkok dalam industri perminyakan Sudan Selatan telah membuka peluang bagi Tiongkok untuk lebih jauh meng-eksplorasi kegiatan pembangunan di Juba, salah satunya ialah dengan menjadi partner utama dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

3.1.2 Perlindungan Tenaga Kerja Tiongkok

Sejalan dengan investasi perminyakan yang dilakukan Tiongkok di Sudan Selatan, Beijing juga memiliki kepentingan dalam mengirimkan tenaga kerja mereka ke kawasan yang banyak di huni oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan model investasi Tiongkok yang selalu membawa tenaga kerjanya untuk dipekerjakan pada perusahaan trans-nasionalnya (Xiaoyang, 2016, p. 110). Hal ini sempat menimbulkan kritik diberbagai negara mengenai kebiasaan Tiongkok yang selalu membawa pekerjanya dalam setiap melakukan investasi. Meskipun demikian, Tiongkok tetap melakukan migrasi tenaga kerja pada kasus Sudan Selatan. Melihat lebih dalam mengenai kebijakan ketenagakerjaan Tiongkok, dapat dilihat bahwa iklim domestik Tiongkok sedang mengalami transisi kelas sosial serta adanya arus urbanisasi yang tinggi, hal ini disebabkan oleh

kebangkitan ekonomi yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Industrialisasi yang terjadi di kota-kota besar Tiongkok telah menciptakan arus urbanisasi besar-besaran (China Power, 2019). Disisi lain, situasi ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan upah buruh di kota-kota besar Tiongkok (Seto, 2013).

Dalam hal ini Tiongkok melihat bahwa investasi luar negeri memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan trans-nasionalnya untuk mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang lebih murah dibandingkan para pekerja di Tiongkok, transisi kelas di Tiongkok juga telah membuat upah buruh di Beijing semakin meningkat tiap tahunnya. Oleh karenanya Tiongkok harus mencari opsi lain guna mendapatkan tenaga kerja yang murah, dalam hal ini Afrika menjadi destinasi yang tepat dengan melihat pendapatan minimum warga Afrika. Meskipun demikian, Tiongkok juga tetap mempekerjakan tenaga kerjanya diberbagai perusahaan di Sudan Selatan. Hal ini merupakan karakteristik dari proses investasi asing Tiongkok, dimana perusahaan-perusahaan trans-nasional tetap mempekerjakan tenaga kerja asalnya dengan alasan efisiensi. Perusahaan-perusahaan asal Tiongkok juga mengatakan bahwa mereka akan tetap mempekerjakan buruh migrannya serta menjadikan mereka sebagai medium dari proses pertukaran ilmu antara pekerja Tiongkok dengan pekerja lokal.

Sehingga dapat dilihat bahwa upaya Tiongkok melakukan mediasi di Sudan Selatan juga merupakan strategi untuk memberikan keamanan bagi para pekerja Tiongkok serta memberikan iklim yang memadai untuk melaksanakan proses investasinya. Disisi lain, Tiongkok juga mendapatkan keuntungan dimana para buruhnya mampu mendapatkan lapangan pekerjaan pada proyek-proyek besar hasil

dari investasi asing perusahaan Tiongkok. Hal ini tentu akan meningkatkan daya serap pekerja serta mengurangi jumlah pengangguran di Tiongkok.

3.1.3 Diplomasi ‘Hutang’ Tiongkok

Dalam melaksanakan kerjasama ekonomi Tiongkok dikenal memiliki prinsip *win-win cooperation* dimana Tiongkok memberikan bantuan pinjaman modal untuk pengembangan infrastruktur dengan bunga yang sangat rendah (Taj, 2019). Prinsip ini yang membuat strategi ekonomi Tiongkok digemari oleh negara-negara berkembang seperti Sudan Selatan. Meskipun demikian, proses ini juga menimbulkan kritik ketika banyak negara berkembang yang tak mampu membayar biaya peminjaman hingga jatuh tempo dan mengharuskan negara tersebut untuk memberikan aset negaranya. Beberapa ahli menamakan strategi yang dilakukan Tiongkok ini sebagai *China debt-trap diplomacy* (Yi, 2019).

Bantuan pinjaman pembangunan yang ditawarkan oleh Tiongkok tersebut mencakup pada beberapa aspek, salah satunya ialah rencana Tiongkok untuk memberikan pinjaman guna merenovasi bandara ibukota Sudan Selatan tiga bulan sebelum konflik terjadi. Pemerintah Tiongkok telah menyiapkan dana hingga US\$150 juta yang akan dioperasionalkan oleh perusahaan *China Harbour Engineering Company*, salah satu proses renovasinya ialah memperluas area bandara dari 2.400m hingga 3.100m serta penambahan ruang imigrasi hingga lahan parkir bandara, hal ini dilakukan guna meningkatkan kuantitas mobilisasi Sudan Selatan (AIDDATA, 2013; Aleu, 2014; Arab News, 2017). Program lainnya yang sedang diinisiasi oleh kedua negara adalah melakukan kerjasama dalam pembuatan *Air Traffic Management* (ATM), dimana Tiongkok memberikan dana pinjaman

hingga mencapai US\$248.8 juta, proyek ini juga akan dikerjakan oleh *Harbour Engineering Company* (The State Council of People's Republic of China, 2018).

Lebih lanjut, Tiongkok juga memberikan penawaran pinjaman pembangunan dalam bidang pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan kepercayaan pemerintah Sudan Selatan, Tiongkok juga memainkan peran strategis dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Sudan Selatan. Sejak 2012 Tiongkok telah menawarkan bantuan pinjaman pembangunan bagi Sudan Selatan untuk mengembangkan infrastruktur publik hingga mencapai US\$8 juta. Dana tersebut akan dialokasikan bagi pembangunan jalan, telekomunikasi, program pertanian hingga program hydropower (DW, 2012). Upaya Tiongkok tersebut sesuai dengan tren hubungan bilateralnya yang seringkali menempatkan 'hutang' sebagai strategi kerjasama dengan negara-negara berkembang.

Berbagai program pembangunan tersebut merupakan karakteristik dari strategi kerjasama ekonomi Tiongkok dengan berbagai negara. Hal ini pula yang dilakukan Tiongkok pada Sudan Selatan, pemberian bantuan pembangunan dianggap menjadi salah satu metode diplomasi Tiongkok dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara berkembang. Upaya ini juga dilakukan oleh Tiongkok dalam rangka untuk menciptakan hubungan yang berketergantungan, pemberian bantuan dengan bunga rendah ini menjadi berbahaya bagi beberapa negara berkembang apabila tidak memperhitungkan konsekuensi yang akan di tanggung (Wang, 2019). Sri langka dan Zimbabwe dianggap sebagai salah satu kasus yang menyita perhatian, terutama dalam pembahasan mengenai strategi pinjaman hutang Tiongkok yang seringkali memberikan dampak negatif bagi negara-negara berkembang (Mukeredzi, 2014).

Pembentukan hubungan yang berketergantungan dengan Tiongkok merupakan poin utama yang coba dimainkan oleh Tiongkok dalam hal pemberian bantuan pembangunan. Proses inilah yang kemudian digunakan oleh Tiongkok demi mendapatkan pengaruh dalam suatu kawasan. Terpilihnya renminbi sebagai *special drawing rights* (SDR) sejak tahun 2015 juga memiliki kaitan dengan bantuan pembangunan ini, hal ini ditambah dengan menguatnya renminbi sebagai salah satu nilai tukar mata uang dunia (IMF, 2019). Hal ini berdampak pada pengurangan penggunaan dolar Amerika dalam tiap transaksinya, yang mana kondisi ini menguntungkan Tiongkok oleh karena adanya upaya dari Beijing untuk menggunakan renminbi sebagai alat transaksi guna mendorong proses internasionalisasi renminbi. Sehingga dapat dilihat bahwa upaya Tiongkok untuk menjaga stabilitas investasinya juga didorong oleh keinginan untuk mendorong pengaruh Tiongkok di kawasan serta meningkatkan popularitas penggunaan renminbi sebagai alat tukar transaksi asing.

3.2 Jangkauan Pengaruh Tiongkok

Pada bagian ini penulis akan mengeksplorasi mengenai jangkauan pengaruh Tiongkok pada proses mediasi konflik. Menurut artikel Degang Sun dan Yahia Zoubir, Tiongkok akan lebih berkeinginan untuk memediasi konflik apabila mereka memiliki akses terhadap kedua pihak yang berkonflik, dalam bagian ini Sun dan Zoubir berargumen bahwa pengaruh Tiongkok pada kedua pihak yang berkonflik akan memengaruhi keputusan Tiongkok untuk bersedia memediasi suatu konflik. Pada bagian ini Sun dan Zoubir juga menyebutkan bahwa Tiongkok pada dasarnya

enggan untuk mengeluarkan sumber dayanya dalam proses mediasi, sehingga hal inilah yang pada akhirnya membuat Tiongkok berperan sebagai *quasi-mediator*.

3.2.1 Bantuan Amunisi Perang Tiongkok ke Sudan Selatan

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh *Conflict Armament Research* (CAR), Tiongkok diindikasikan memiliki andil terhadap berjalannya perang saudara di Sudan Selatan dalam hal penyediaan pasokan senjata. Pada laporan tersebut mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pasokan senjata yang diproduksi di Tiongkok, tercatat bahwa 37% dari pasokan senjata serta 99% amunisi perang merupakan produksi perusahaan yang berbasis di Tiongkok. Pasokan senjata tersebut tersebar bagi kedua pihak yang berkonflik, baik SPLM/A-IG ataupun SMPLM/A-IO. Pada 2014 ditemukan bahwa pengiriman pasokan senjata merupakan hasil dari kerjasama SPLM dan SPLM-IO dengan negara-negara tetangganya, dimana negara tetangganya seperti Uganda, Ethiopia dan Sudan memiliki andil dalam proses transfer senjata ke daerah konflik di Sudan Selatan (Holland, 2018).

Pada Mei 2014, perusahaan yang berbasis di Tiongkok *China North Industries Corporation* (Norinco) melakukan dua pengiriman besar melalui jalur laut menuju Juba, dengan membongkar muatan di pelabuhan Kenya, Mombasa. Pengiriman ini ditujukan untuk Menteri Pertahanan Sudan Selatan. Menurut hasil investigasi CAR, pengiriman senjata ini terdiri dari 27 juta peluru amunisi kaliber kecil, 40.000 jenis 69 40 mm roket, 20.000 BGL2 ukuran 40 mm granat, 2.394 peluncur granat ukuran 40 mm, 1.200 rudal anti-tank Tipe HJ-73D, 100 peluncur HJ-73, 9.574 senapan serbu Tipe 56 (pola-AK) ukuran 7,62 × 39 mm, 660 pistol tipe NP42 ukuran 9 mm, 319 mesin meriam tipe 80, dan peralatan militer lainnya.

Pengiriman pasokan senjata ini legal di mata hukum oleh karena pada saat itu PBB belum menetapkan aturan mengenai embargo senjata pada kawasan Sudan Selatan (Conflict Armament Research, 2018, p. 17).

Disisi lain, Tiongkok juga secara tidak langsung telah memberikan pasokan senjatanya pada pihak pemberontak melalui Sudan. Artikel *The East African* mengindikasikan adanya kerjasama terselubung antara Sudan dengan pihak pemberontak untuk menyalurkan pasokan senjata. Dalam temuan ini didapati bahwa sekitar 1.300 kotak amunisi senjata yang berasal dari Tiongkok ditemukan di perbatasan Sudan. Amunisi tersebut merupakan hasil penjualan Tiongkok pada Sudan yang kemudian di alokasikan pada pihak pemberontak oleh Sudan (The East African, 2016). Pada kasus ini penulis tidak menemukan bukti mengenai pengiriman pasokan senjata Tiongkok pada pihak pemberontak secara langsung. Sehingga pasokan senjata Tiongkok ke pihak pemberontak diindikasikan merupakan hasil dari transaksi antara Sudan dengan pihak pemberontak.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa penyediaan pasokan senjata dari Tiongkok telah membuktikan bahwa Tiongkok memiliki kedekatan terhadap SPLM/A serta hal ini juga membuktikan bahwa Tiongkok tidak memiliki itikad yang penuh dalam menyelesaikan konflik di Sudan Selatan. Penjualan senjata dalam skala yang besar pada pemerintah Sudan Selatan merupakan indikasi utama dari kepentingan ekonomi Tiongkok dalam memediasi Sudan Selatan. Lebih dalam lagi dapat dilihat bahwa Tiongkok telah lebih dulu melakukan proses dialog dengan pihak yang berkonflik untuk menjaga aset dan properti Tiongkok pada masa konflik, hal ini ditambah dengan disepakatinya Deklarasi Khartoum yang salah satu

pembahasannya ialah meniadakan konflik yang dapat merusak kilang-kilang minyak Tiongkok.

3.2.2 Bantuan Kemanusiaan Tiongkok Pada Sudan Selatan

Pada bagian ini penulis akan mengeksplorasi mengenai bantuan kemanusiaan Tiongkok pada Sudan Selatan. Penulis menilai bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan pada Sudan Selatan ini memiliki pengaruh yang cukup besar pada keterlibatan pihak yang bertikai dalam proses mediasi. Dalam hal ini bantuan kemanusiaan dijadikan sebagai pemicu (*carrot*) bagi Sudan Selatan untuk bersedia mengikuti mediasi. Proses ini telah memberikan daya tawar yang lebih bagi Tiongkok untuk memaksa kedua belah pihak untuk bersedia mengikuti jalannya proses perdamaian yang dipimpin oleh IGAD.

Artikel yang dipublikasikan Zhou Hang menjelaskan mengenai kontribusi Tiongkok dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada Sudan Selatan. Tiongkok memberikan bantuan dana pertamanya pada Desember 2013 dengan menyalurkan bantuan senilai US\$100.000 melalui *Red Cross*. Bantuan ini terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu, pada Januari 2014 Duta Besar Tiongkok untuk Sudan Selatan, Ma Qiang menyepakati kerjasama ekonomi dengan Juba dan berjanji akan memberikan bantuan dana sebesar US\$ 3 juta. Aliran dana besar lainnya datang ketika Li Keqiang mengunjungi pusat Uni Afrika di Ethiopia, ia berjanji akan menambahkan bantuan sebesar US\$ 8 juta untuk keadaan darurat. Secara keseluruhan Tiongkok berjanji untuk memberikan bantuan dana sebesar US\$21 juta, jumlah tersebut bisa terus bertambah hingga US\$45 juta, tergantung dari alokasi kesepakatan dana tersebut (Hang, 2014). Bantuan dana ini berdampak pada daya tawar Tiongkok pada proses mediasi konflik, Tiongkok menjadikan

bantuan dana ini sebagai tindakan persuasif bagi Sudan Selatan untuk mau merundingkan pembicaraan damai dengan IGAD.

Beberapa pertemuan antara pemerintah Sudan Selatan dengan pemberontak diinisiasi oleh Tiongkok, dalam hal ini Tiongkok juga tidak segan untuk menyalurkan dana untuk proses mediasi konflik antara kedua belah pihak. Satu bulan pasca pecahnya perang sipil, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, berkunjung ke Addis Ababa, Ethiopia, guna melangsungkan pertemuan secara khusus dengan perwakilan dari kedua pihak yang berkonflik. Pada pertemuan tersebut Wang Yi mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak mengenai situasi konflik yang terjadi, Wang Yi mengajak kedua pihak untuk setuju pada gencatan senjata yang kemudian Tiongkok akan bersedia untuk mengatur proses berjalannya pembicaraan damai (FMPRC, 2014).

Dengan berdasar pada fakta bahwa Tiongkok menjadi salah satu negara pendonor bantuan kemanusiaan dan investor industri minyak terbesar di Sudan Selatan, maka dapat dilihat bahwa Tiongkok memiliki daya tawar yang tinggi untuk memberikan tekanan bagi kedua pihak untuk melaksanakan proses de-eskalasi konflik (Abdelaziz, 2014). Hal ini juga lah yang diharapkan pada pembentukan IGAD-PLUS mengingat adanya kegagalan proses kesepakatan damai antara pihak yang bertikai. Pada mekanisme penyelesaian konflik tersebut Tiongkok secara rutin berpartisipasi dalam perumusan perundingan damai serta memonitor hasil perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada perundingan revitalisasi ARCSS Tiongkok juga berpartisipasi dengan menyatakan komitmennya untuk membantu proses mediasi konflik Sudan Selatan yang dipimpin oleh IGAD serta

menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan kemanusiaan apabila diperlukan (FMPCR, 2017).

3.3 Perhatian Dunia Internasional Terhadap Konflik Sudan Selatan

Pada bagian ini Degang Sun dan Yahia Zoubir berargumen bahwa semakin besar perhatian dunia dan aktor-aktor besar terhadap suatu konflik, maka semakin besar potensi Tiongkok untuk berperan sebagai *quasi-mediator* dalam konflik tersebut. Sun dan Zoubir menambahkan bahwa Tiongkok lebih memilih untuk absen dalam memediasi suatu konflik apabila tidak ada konsensus dari negara kekuatan besar lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena kekhawatiran Tiongkok untuk gagal memediasi konflik oleh karena tidak adanya aktor lainnya yang membantu penyelesaian konflik. Tiongkok yang sedang membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab memiliki kepentingan untuk menjaga profil negaranya untuk tidak gagal dalam proses penyelesaian konflik. Disamping itu, Sun dan Zoubir juga melihat bahwa upaya Tiongkok dalam memediasi konflik juga didasari oleh adanya desakan masyarakat internasional yang ingin melihat Tiongkok untuk lebih aktif dalam menjaga perdamaian, hal ini sejalan dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok yang memberikan kewajiban moral untuk bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia.

3.3.1 Keterlibatan Kekuatan Besar Dunia Dalam Proses Mediasi

Jika melihat kasus yang terjadi pada konflik Sudan Selatan, perhatian aktor-aktor besar di dunia sangatlah besar, bahkan beberapa aktor tersebut ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana komposisi IGAD-PLUS yang diisi oleh berbagai elemen, mulai dari Amerika Serikat, Britania Raya, 5 negara Uni Afrika, Norwegia, Tiongkok dan juga merangkul Perserikatan

Bangsa Bangsa. Lebih dalam lagi, kontribusi PBB dalam isu Sudan Selatan sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembentukan misi khusus di Sudan Selatan yang dibuat pada tahun 2011, misi ini dinamakan sebagai *United Mission on South Sudan* (UNMISS). Misi ini pada dasarnya dibuat dalam rangka menjaga stabilitas Sudan Selatan yang baru merdeka, namun pada perjalanannya misi ini juga memberikan kontribusi terhadap proses perdamaian kawasan.

Negara-negara tersebut juga merupakan bagian dari CTSAMVM dan RJMEC dalam melakukan pengawasan terhadap kesepakatan revitalisasi ARCSS. Sehingga dapat dilihat bahwa proses mediasi konflik tetap dipegang secara penuh oleh IGAD. Meskipun demikian, kehadiran negara-negara tersebut memberikan pengaruh dalam hal dorongan finansial serta tindakan persuasif bagi penyelesaian konflik. Salah satu negara yang aktif dalam memberikan bantuan ialah Amerika Serikat. Sejak konflik berlangsung, AS seringkali memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, ketersediaan nutrisi, air bersih, bantuan kesehatan hingga pendidikan bagi jutaan rakyat Sudan Selatan (U.S Department of State, 2018). Dalam proses penyelesaian konflik, AS bermitra dengan Norwegia dan Britania Raya dalam kerangka kerjasama yang dinamakan sebagai Troika. Troika mendukung penuh kepemimpinan IGAD dalam proses penyelesaian konflik. Bantuan tersebut berupa bantuan finansial serta keterlibatan Troika dalam mengawasi implementasi perjanjian ARCSS dan revitalisasi ARCSS.

Dalam perjalanannya, Troika juga memberikan gagasan-gagasan konstruktif terhadap proses penyelesaian konflik kepada IGAD sebagai pemimpin proses mediasi. Salah satu masukan yang diberikan oleh Troika ialah perlunya tindakan demiliterisasi di Ibukota Juba, hal ini dalam rangka memberikan

keleluasaan bagi UNMISS untuk bertindak sesuai dengan mandat yang telah disepakati. Selain itu Troika juga menekankan pentingnya peran IGAD dalam melakukan observasi secara menyeluruh terhadap implementasi dari keputusan embargo senjata yang diberikan oleh *United Nation Security Council* (UNSC). Dalam hal ini Troika menekan anggota IGAD untuk mentaati peraturan tersebut dalam upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Sudan Selatan (Sudan Tribune, 2018). Gagasan tersebut disampaikan oleh Troika dalam agenda yang diselenggarakan oleh IGAD yakni *IGAD Council of Ministers' Meeting on South Sudan* (U.S. Mission to The African Union, 2018).

Disisi lain, kehadiran PBB dalam proses penyelesaian konflik juga memberikan dampak terhadap dinamika penyelesaian perang sipil Sudan Selatan. Selain memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban terdampak perang sipil, UNMISS juga memiliki peran dalam menciptakan stabilitas keamanan lingkungan. Hal ini dilakukan oleh UNMISS dengan menggunakan beberapa instrumen keamanan, diantaranya ialah mengirimkan tentara militer dibawah departemen penjaga perdamaian PBB. Salah satu peran utama dari militer PBB adalah melindungi dan menjaga warga sipil dari kekerasan fisik, yang mana hal ini masih diabaikan oleh pemerintah Sudan Selatan. Dalam pelaksanaannya, PBB memiliki dua departemen untuk melakukan pemantauan terhadap kejahatan fisik bagi warga Sudan Selatan. Selain mengirimkan bantuan militer, PBB juga membentuk badan yang dinamakan sebagai *UN Police* dengan mandate yang serupa dengan pengerahan militer (UNMISS, 2019; UNMISS, 2019).

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa keterlibatan aktor-aktor lain dalam proses perdamaian di Sudan Selatan telah memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk

berperan sebagai *quasi-mediator*. Penulis melihat bahwa ke-engganannya Tiongkok untuk mengeluarkan banyak sumber daya dalam proses mediasi juga dipengaruhi oleh banyaknya bantuan yang diberikan oleh aktor-aktor besar lainnya. Sehingga Tiongkok tidak merasa perlu untuk berperan secara aktif dalam menjaga stabilitas oleh karena keterlibatan aktor lain telah membantu terciptanya stabilitas kawasan di Sudan Selatan. Pada beberapa kasus tertentu juga Tiongkok melakukan proses konsultasi dengan beberapa negara anggota IGAD-PLUS dalam mencari jalan keluar dari konflik Sudan Selatan.

3.3.2 Desakan Masyarakat Internasional

Pada bagian ini penulis akan menyoroti mengenai adanya desakan masyarakat internasional terhadap Tiongkok untuk berkontribusi terhadap isu-isu kemanusiaan, hal ini terjadi dalam kasus Sudan. Pada tragedi pembantaian yang terjadi di Darfur, Tiongkok didesak untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kekuatan besar dunia dengan melakukan tindakan pencegahan serta menengahi konflik yang terjadi di Sudan. Desakan internasional tersebut pada akhirnya mengubah kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Sudan, kampanye pemberhentian tindakan kekerasan serta mengirimkan diplomatnya ke Sudan untuk mendiskusikan mengenai upaya pemberhentian tindakan kekerasan. Meskipun demikian, upaya Tiongkok tersebut mendapat kritik yang tajam dari masyarakat internasional oleh karena adanya indikasi bahwa Tiongkok membantu proses pembantaian yang terjadi. Hal ini dengan melihat bukti bahwa Tiongkok berpartisipasi dalam melakukan pelatihan bagi militer Sudan Selatan pada situasi konflik (Anderson, 2008).

Selain melakukan pelatihan terhadap militer Sudan, Tiongkok juga dianggap telah berkontribusi terhadap penyediaan pasokan persenjataan bagi pemerintah Sudan secara rutin. Tercatat pada tahun 2007 Tiongkok kedapatan melakukan pengiriman kapal perang serta helikopter bersenjata pada Sudan. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok meskipun Sudan telah dijatuhkan hukuman embargo senjata oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kondisi tersebut membuat masyarakat internasional terus memberikan kritik pada pemerintahan Tiongkok atas tindakan yang dianggap melanggar aturan PBB tersebut (Sudan Reeves, 2007). Gelombang desakan Tiongkok untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut berlangsung hingga pada tahun 2008 ketika terjadi kampanye untuk mem-boikot Olimpiade Beijing (Ahmed, 2010).

Dalam hal ini Tiongkok mendapatkan tekanan yang kuat dari masyarakat internasional mengenai kontribusinya dalam konflik di Darfur. Penulis melihat bahwa hal tersebut yang membuat Tiongkok berupaya untuk membersihkan citra buruk tersebut dengan melakukan mediasi di Sudan Selatan. Tekanan masyarakat internasional terhadap kontribusi Tiongkok dalam menghadapi proses konflik telah menjadi salah satu dorongan bagi Beijing untuk mengubah pola kebijakan luar negerinya, tindakan aktif Beijing dalam memediasi konflik di Sudan Selatan telah memberikan harapan baru bahwa Tiongkok telah memiliki peran dalam perdamaian dunia. Sehingga dapat dilihat bahwa keinginan Tiongkok untuk memediasi konflik juga datang dari tekanan masyarakat internasional yang mempertanyakan tentang kontribusi Tiongkok sebagai kekuatan besar dunia yang bertanggungjawab. Hal ini juga sejalan dengan 'impian Tiongkok' yang memiliki tujuan untuk melaksanakan pembangunan yang damai.

Selain itu, upaya pemerintah Tiongkok untuk mengembalikan citra positif dari masyarakat internasional juga menjadi dorongan terhadap perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Terpilihnya Xi Jinping sejak tahun 2013 juga telah memberikan dampak yang signifikan dalam perubahan arah kebijakan luar negeri Tiongkok. Perubahan kebijakan tersebut juga mendapat perhatian internasional manakala Tiongkok dianggap telah mengabaikan prinsip yang mereka percayai, yaitu prinsip non-intervensi. Meskipun demikian, upaya Tiongkok tersebut merupakan jalan yang tidak bisa dihindari seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Peningkatan jumlah investasi asing Tiongkok di berbagai negara memberikan kerentanan bagi stabilitas ekonomi Tiongkok apabila mereka tidak mampu menciptakan perdamaian pada kawasan-kawasan investasinya.

3.4 Tingkat Kesulitan Penyelesaian Konflik

Pada bagian ini penulis akan mendalami mengenai tingkat kesulitan penyelesaian konflik sudan selatan serta kaitannya dengan keterlibatan Tiongkok dalam memediasi konflik tersebut. Dalam artikel Degang Sun dan Yahia Zoubir dijelaskan bahwa semakin mudah proses penyelesaian konflik, maka semakin besar potensi Tiongkok dalam memainkan peran sebagai *quasi-mediator*. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya yang akan dikeluarkan oleh Tiongkok apabila konflik dikategorikan pada level yang mampu untuk diselesaikan. Pengukuran tingkat kesulitan dari suatu konflik dilihat dari bagaimana akar permasalahan yang terjadi dari konflik tersebut dan kesediaan kedua belah pihak yang berkonflik untuk berkomitmen dalam proses mediasi serta melaksanakan pembicaraan damai.

Dalam hal ini, perang sipil yang terjadi di Sudan Selatan termasuk pada kategori konflik yang cukup sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut dilihat dari ketegangan kedua pihak yang berkonflik untuk memiliki komitmen perjanjian damai. Perluasan masalah juga terjadi ketika konflik yang pada awalnya bersumber dari perbedaan kepentingan politik, kemudian bertransformasi menjadi konflik etnisitas. Perang sipil antara etnis Dinka yang dipimpin oleh Salva Kiir dan etnis Nuer yang dipimpin oleh Riek Machar menambah kesulitan dari proses rekonsiliasi kedua belah pihak. Situasi tersebut menambah pelik situasi konflik yang pada awalnya didorong pada perebutan kekuasaan, namun pada tataran masyarakat konflik terjadi oleh karena adanya rasa kebencian antar etnis (Williams, 2017).

Dalam hal ini penulis melihat bahwa meskipun proses konflik Sudan Selatan terbilang rumit, namun Tiongkok tetap melihat bahwa kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk melakukan proses rekonsiliasi dan pembicaraan damai. Hal ini terlihat ketika Tiongkok menawarkan diri untuk membantu jalannya mediasi, kedua belah pihak yang berkonflik menyambut baik keinginan Tiongkok tersebut (Xinhua, 2018; Xinhua, 2016). Disisi lain, pihak SPLM/A dan SPLM/A-IO juga telah berkomitmen untuk melaksanakan pembicaraan damai dengan mempercayai proses mediasi yang di pimpin oleh blok regional yakni IGAD. Hal tersebut menandakan bahwa pada dasarnya pihak pemerintah dan oposisi memiliki itikad untuk melaksanakan pembicaraan damai. Pada awal proses mediasi, IGAD mendapat tantangan manakala pihak pemerintah dan oposisi enggan dalam melaksanakan pembicaraan damai, situasi tersebut berangsur membaik setelah pembentukan mekanisme IGAD-PLUS yang diprakarsai atas kegelisahan IGAD akan progres dari pembicaraan damai.

Pasca pembentukan IGAD-PLUS kedua belah pihak memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan proses perjanjian damai. Hal ini seiring dengan pengaruh dari aktor-aktor asing yang mendesak Sudan Selatan untuk memberhentikan perang sipil guna meminimalisir dampak kekerasan fisik bagi warga sipil. Lebih lanjut lagi, pemberian bantuan asing yang dijadikan sebagai *'carrot'* terbukti ampuh dalam memaksa proses pembicaraan damai. Meskipun demikian, dorongan asing ini menuai kritik pasca terjadinya konflik susulan 6 bulan setelah perjanjian ARCSS di sahkan pada tahun 2015. Penulis melihat bahwa proses perjanjian ARCSS terkesan dipaksakan oleh karena adanya desakan pihak asing, sehingga pihak yang berkonflik masih merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa Tiongkok tetap melakukan proses mediasi di Sudan Selatan oleh karena adanya potensi bagi kedua belah pihak untuk melakukan pembicaraan damai. Disamping itu, kepentingan ekonomi Tiongkok juga tidak bisa dipisahkan. Kepentingan tersebut telah menjadi pendorong utama bagi keterlibatan Tiongkok dalam memediasi konflik di Sudan Selatan meskipun memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Lebih jauh, penulis menilai bahwa dalam kasus Sudan Selatan, tingkat kesulitan konflik yang terjadi di Sudan Selatan telah tertutupi oleh urgensi dari Tiongkok untuk mengamankan iklim investasinya. Sehingga tingkat kesulitan konflik tidak terlalu diperhitungkan oleh Tiongkok dalam melakukan proses mediasi konflik di Sudan Selatan.

Tabel dibawah merupakan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tiongkok untuk memediasi konflik menurut Degang Sun dan Yahia Zoubir, dengan melihat kasus yang terjadi di Sudan Selatan.

Tabel 3.1: Motivasi Tiongkok memediasi Sudan Selatan

Faktor yang Memotivasi Tiongkok untuk Melakukan Mediasi	Motivasi Tiongkok memediasi Sudan Selatan
Relevan dengan kepentingan geo-ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok melihat Sudan Selatan sebagai potensi dalam industri perminyakan, • Tiongkok ingin melindungi iklim ketenagakerjaannya, • Tiongkok ingin menciptakan hubungan ketergantungan pada Sudan Selatan.
Jangkauan Pengaruh Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok memberikan bantuan persenjataan pada kedua belah pihak, • Tiongkok menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai 'carrot' bagi kedua pihak yang berkonflik.
Perhatian Dunia Internasional Terhadap Konflik Sudan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok mendukung keterlibatan Troika dan pembentukan IGAD-PLUS oleh IGAD, • Desakan masyarakat internasional terhadap keterlibatan Tiongkok di Darfur, telah mendorong Tiongkok untuk memediasi Sudan Selatan guna mengembalikan citranya.
Tingkat Kesulitan Penyelesaian Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Tiongkok melihat adanya potensi pembicaraan damai, • Tiongkok memiliki pengaruh untuk memaksa kedua pihak untuk melakukan proses mediasi.